

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong dilakukannya penataan perangkat daerah hingga ditetapkan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut menetapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) yang diatur dengan Pergub Jateng Nomor 66 Tahun 2016.

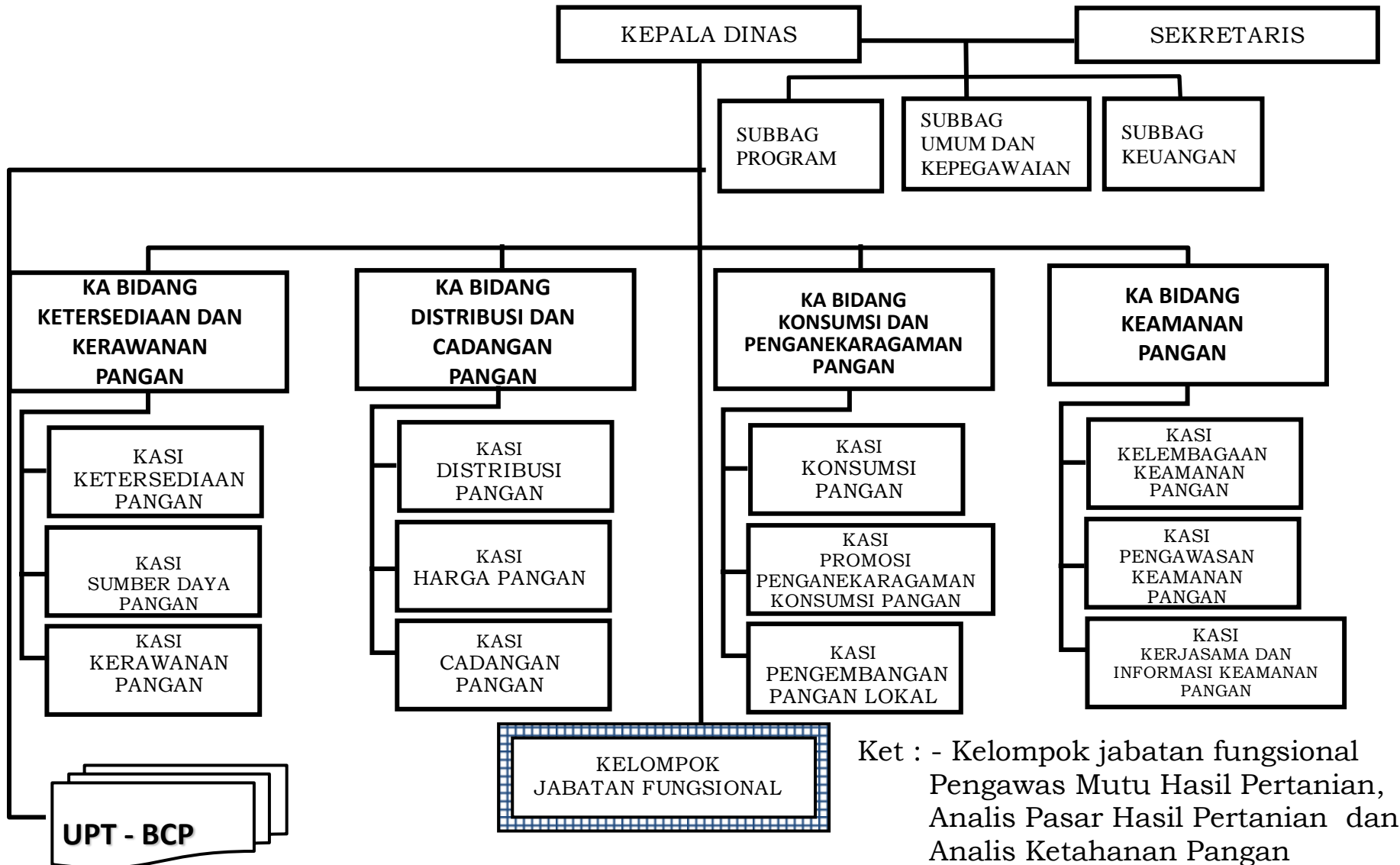
DISHANPAN mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

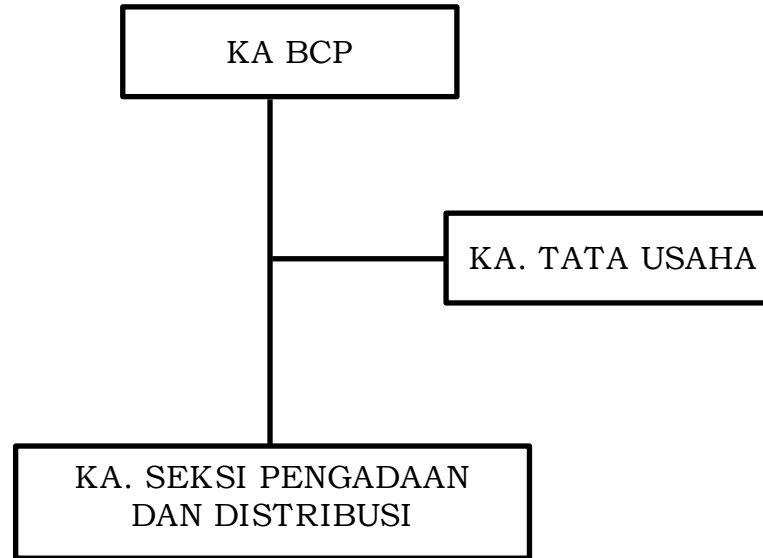
1. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 2 atau 3 Pejabat Pengawas sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Tugas pokok dan fungsi setiap bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi  
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi  
UPTD Balai Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah**



## A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- b. Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

## **B. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Seksi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan.

- a. Seksi Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Sumber Daya Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- c. Seksi Kerawanan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

## **C. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan dan Seksi Cadangan Pangan.

- a. Seksi Distribusi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan
- b. Seksi Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan
- c. Seksi Cadangan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan

#### **D. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan**

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

- a. **Seksi Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan
- b. **Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan
- c. **Seksi Pengembangan Pangan Lokal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal

#### **E. Bidang Keamanan Pangan**

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan, dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Seksi Kelembagaan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

- a. **Seksi Kelembagaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan
- b. **Seksi Pengawasan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan

- c. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan

#### **F. Balai Cadangan Pangan**

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan di bidang Pengadaan dan penyaluran cadangan pangan. Balai Cadangan Pangan, mempunyai fungsi:

- (a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (b) Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (c) Evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan
- (d) Pengelolaan penatausahaan
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Balai Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan, Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016.

#### **G. Kelompok Jabatan Fungsional**

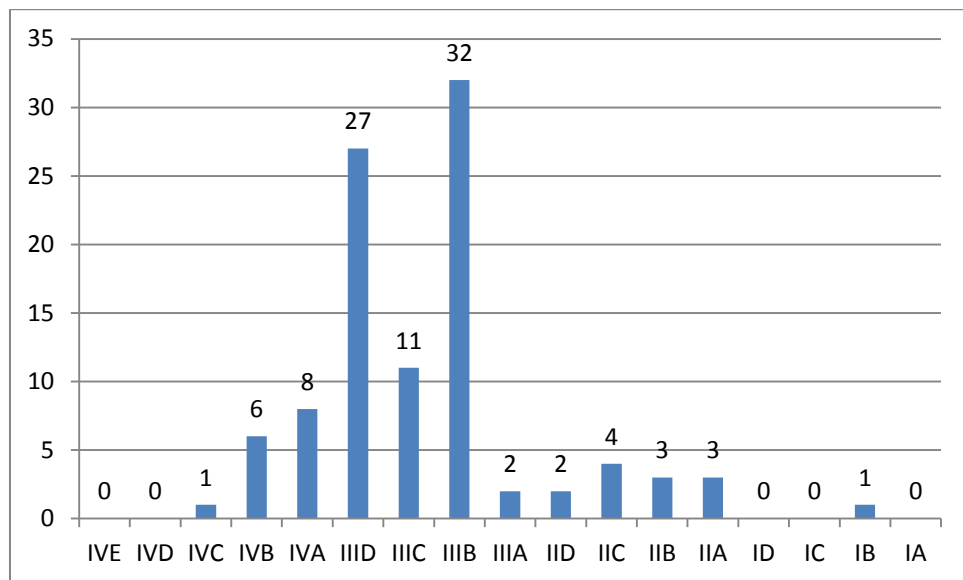
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

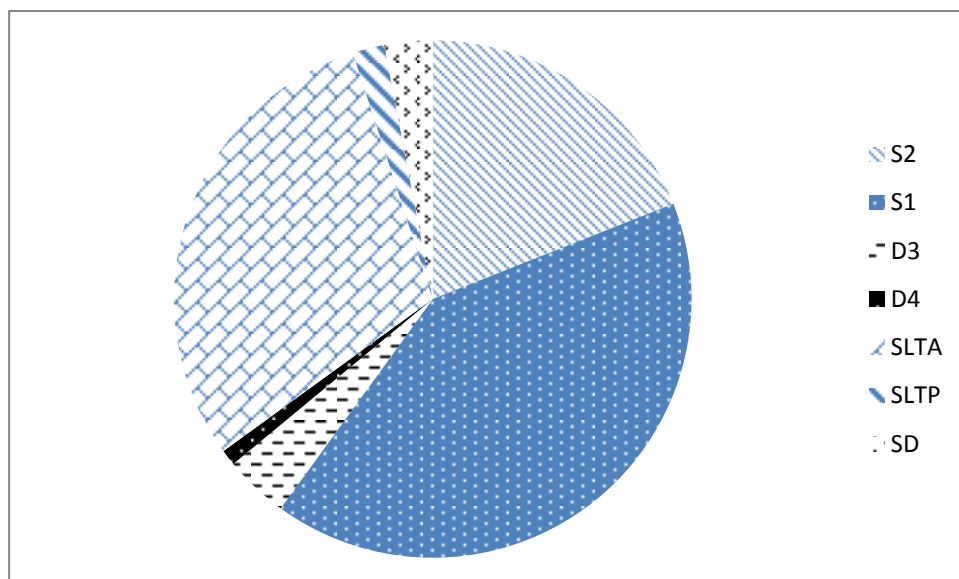
### A. Sumber Daya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia s.d. Januari 2017 sebanyak 100 orang. Terdiri dari 24 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 6 orang pejabat eselon III, 17 orang eselon IV dan 74 jabatan fungsional umum dan 2 orang staf fungsional tertentu, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 2.3.).



**Gambar 2.3. PNS Berdasar Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Januari 2017**

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Januari 2017 sebagai berikut:



**Gambar 2.4. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Januari 2017**

## B. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana Tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Sarana Prasarana Gedung Tahun 2014 - 2016**

No	Uraian	Jumlah			Total s.d. 2016
		2014	Penambahan 2015	Penambahan 2016	
1	Gedung Kantor (3 Lantai)	1	-	-	1
2	Gedung Kantor (1 Lantai)	1	-	-	1
3	Gudang Cadangan Pangan (kapasitas 200 Ton)	1	-	1	2
4	Lantai Jemur (kapasitas 10 Ton)	1	-	-	1
5	Ruang Rapat (Kapasitas 100 org)	1	-	-	1

Sumber : Subbag Umpeg Dishanpan (2017)

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Pengukuran kinerja pelayanan DISHANPAN dilaksanakan melalui evaluasi kinerja BKP Tahun 2014 – 2016 mengingat BKP merupakan SKPD pelaksana urusan pangan pada kurun waktu tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan oleh BKP sampai dengan tahun 2016.

Berdasarkan pada matrik pengukuran pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari BKP dari seluruh indikator kinerja outcome tercapai sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik. Evaluasi kinerja pelayanan BKP Tahun 2014-2016 menjadi landasan bagi penyusunan Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018. Secara rinci disajikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Regulasi kedaulatan pangan		v		1	1	1	1	1	1	1	1	na	na	100	100	100	na	na
2	Ketersediaan pangan utama (ton beras)	v	v		5.724.620	5.746.959	5.769.946	5.793.026	5.816.198	5.725.783	6.562.656	6.831.297	na	na	100	114	120	na	na
3	Persentase penguatan cadangan pangan	v	v		75	80	90	95	100	100,2	130,6	103,7	na	na	133,7	163,2	115,2	na	na
4	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	v	v		97	100	100	100	100	97,22	100	100	na	na	100,23	100	100	na	na
5	Persentase penanganan daerah rawan pangan	v	v		55	60	60	60	60	56,25	61,29	62,86	na	na	102,3	102,2	104,8	na	na
6	Skor PPH	v	v		90,75	91,13	91,5	86	87	91,78	91,45	91,8	na	na	101,1	100,4	100,3	na	na
7	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	v	v		80	80	80	80	80	86,6	92,42	96,58	na	na	108	116	121	na	na

**Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	12.233.694	14.548.722	14.301.950	14.431.770	na	11.361.062,894	14.137.718,569	13.782.403,054	na	na	92,87	97,17	96,37	na	na	6,04	8,56
Belanja Pegawai	12.233.694	14.548.722	14.301.950	14.431.770	na	11.361.062,894	14.137.718,569	13.782.403,054	na	na	92,87	97,17	96,37	na	na	6,04	8,56
Belanja Langsung	19.774.271	19.277.252	15.037.500	14.780.999	na	19.409.947,696	18.276.038,477	14.742.312,975	na	na	98,16	94,81	98,04	na	na	-8,74	-12,77
Belanja Eks Aparatur	5.094.240	4.825.902	3.415.282	2.807.000	na	4.971.458,946	4.448.772,536	3.338.322,175	na	na	97,59	92,19	97,75	na	na	-44,83	-18,35
Belanja Eks Publik	14.680.031	14.451.350	11.622.218	11.973.999	na	14.438.488,750	13.827.265,941	11.403.990,800	na	na	98,35	95,68	98,12	na	na	-40,38	-10,97
Total Belanja	32.007.965	33.825.974	29.339.450	29.212.769	na	30.771.010,590	32.413.757,046	28.524.716,029	na	na	96,14	95,83	97,22	na	na	-2,67	-3,47

**Keterangan :**

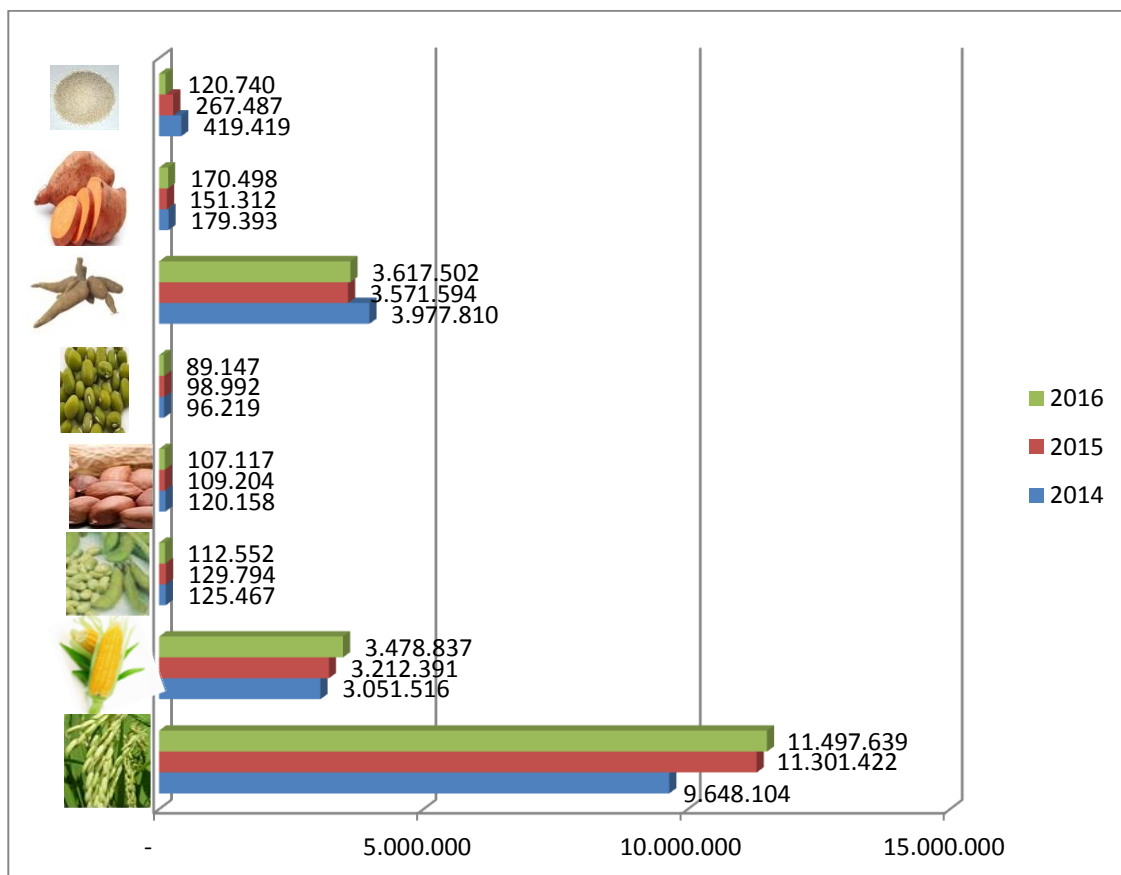
Anggaran Tahun 2014 s.d. 2016 disusun berdasarkan DPPA pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah  
 Anggaran Tahun 2017 disusun berdasarkan DPA pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Pelayanan urusan pangan Tahun 2014 – 2016 dilaksanakan oleh BKP selaku penyelenggara urusan pangan. Pelayanan urusan pangan dilakukan melalui aspek: ketersediaan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan dan manajemen ketahanan pangan.

### A. Ketersediaan Pangan

Produksi komoditas pangan penting Jawa Tengah selama tahun 2014-2016 secara umum mengalami pertumbuhan positif (Gambar 2.5.).

**Gambar 2.5. Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2014-2016**



Produksi padi dan jagung mengalami peningkatan. Kenaikan angka produksi padi tahun 2016 melanjutkan tren peningkatan produksi padi 2014 dan 2015. Pada 2016 produksi padi meningkat 1,68% dari 11,30 juta ton menjadi 11,49 juta ton dibandingkan 2015. Atas keberhasilan meningkatkan produksi ini, Jawa Tengah ikut mensupport keberhasilan Indonesia tidak impor beras pada Tahun 2016. Produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian mengalami penurunan. Kurun waktu tiga tahun terakhir musim hujan di Jawa Tengah lebih panjang sehingga ketersediaan air di lahan cukup mendorong petani lebih banyak melakukan budidaya padi di luar musim. Nilai ekonomis budidaya padi yang lebih tinggi dibandingkan kacang-kacangan dan umbi-umbian menyebabkan lahan-lahan yang biasanya ditanami kacang-kacangan dan umbi-umbian menyusut. Selain luas tanam

yang menurun, penurunan produksi kacang-kacangan juga disebabkan cukup tingginya serangan organisme pengganggu tanaman.

Bagian penjelasan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa “petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan”. Oleh sebab itu harus dipastikan bahwa petani sebagai produsen sekaligus konsumen pangan, memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang diproduksi. Produksi pangan Jawa Tengah setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan tercecer menggambarkan kondisi ketersediaan pangan lokal Jawa Tengah.

**Tabel 2.4. Perkembangan Ketersediaan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2014-2016**

Komoditas	Ketersediaan (Ton)			Rata-rata per tahun	Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016			
<b>I</b>	<b>Pangan Nabati</b>					
1	Padi	5.732.400	6.714.715	6.831.297	6.426.137,23	9,436205
2	Jagung	2.715.849	2.859.028	3.096.165	2.890.347,39	6,783145
3	Kedelai	118.767	122.863	106.542	116.057,26	-4,91771
4	K. Tanah	103.925	94.451	92.645	97.007,05	-5,51373
5	K. Hijau	89.484	92.063	82.907	88.151,13	-3,53161
6	Ubi Kayu	3.813.526	3.424.087	3.468.099	3.568.570,87	-4,46334
7	Ubi Jalar	157.866	133.155	150.038	147.019,69	-1,48684
8	Gula	419.419	264.865	119.556	267.946,94	-45,8555
<b>II</b>	<b>Pangan Hewani</b>					
10	Daging	402.670	268.889	274.025	315.194,58	-15,6567
11	Telur	316.603	272.517	283.399	290.839,60	-4,96581
12	Susu	516.110	80.517	81.951	226.192,72	-41,309

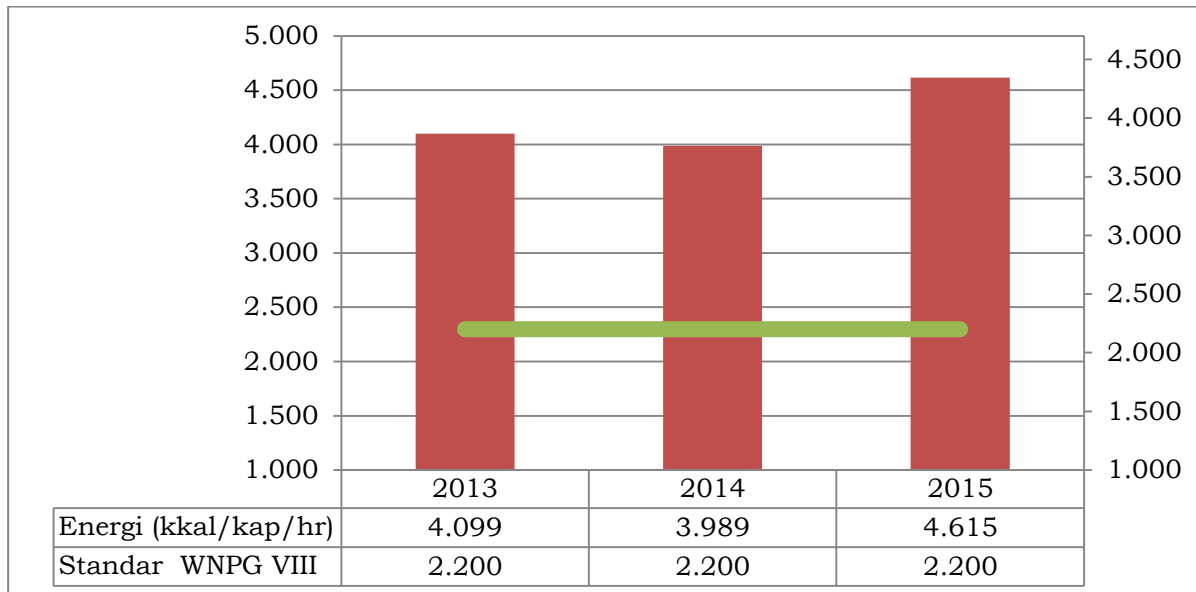
Sumber : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (2017)

Ketersediaan padi dan jagung Jawa Tengah mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan peningkatan produksi padi dan jagung. Selain itu juga adanya dukungan sarana alat mesin pertanian yang lebih modern sehingga susut gabah kering panen menjadi beras itu berkurang.

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Jawa Tengah dari Tahun 2013 – 2015, ketersediaan energi dan protein di Jawa Tengah yang dihitung dari data produksi, keluaran dan pemasukkan pangan serta penggunaan untuk non pangan telah melebihi angka rekomendasi ketersediaan pangan per kapita hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII Tahun 2004, yaitu ketersediaan energi 2.200 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 57 gram/kapita/hari. Rata-rata ketersediaan energi

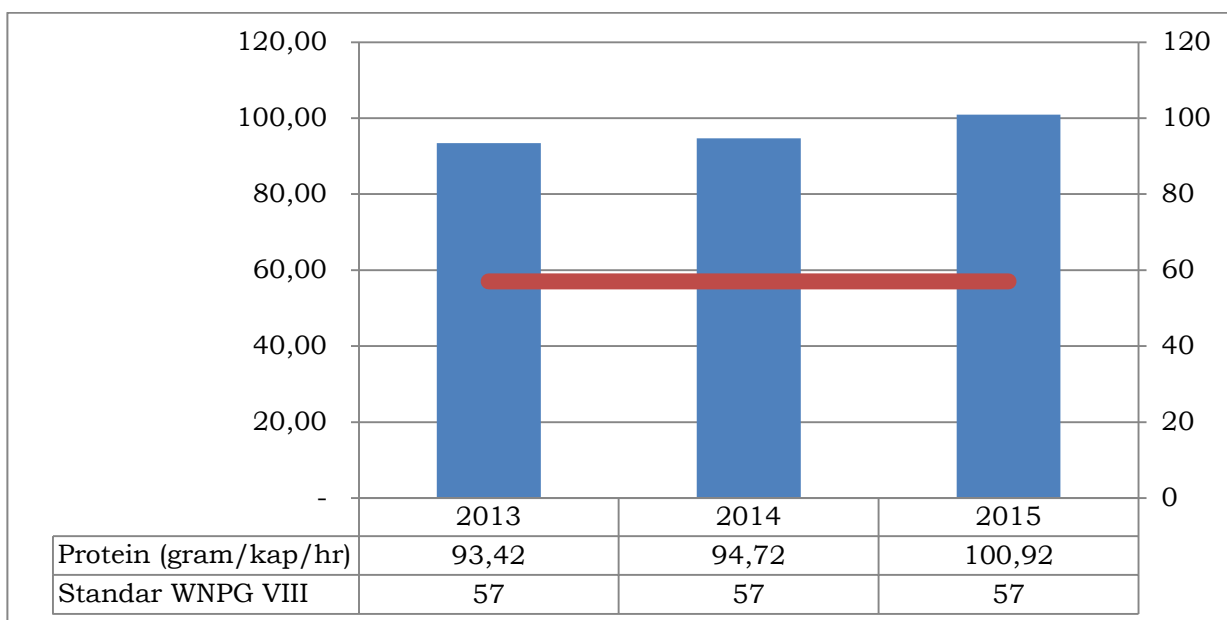
tahun 2013 – 2015 sebesar 4.234,33 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 96,35 gram/kap/hari. Pada periode tersebut, ketersediaan energi naik rata-rata 6,5 persen per tahun dan protein naik rata-rata 3,97 persen per tahun.

**Gambar 2.6. Ketersediaan Energi per Kapita 2014-2016**



Sumber : Neraca Bahan Makanan (BKP)

**Gambar 2.7. Ketersediaan Protein per Kapita 2014-2016**



Sumber : Neraca Bahan Makanan (BKP)

Namun demikian angka ketersediaan bukan satu-satunya faktor dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Faktor aksesibilitas dan daya beli masyarakat lebih berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Oleh karenanya keberhasilan pencapaian angka ketersediaan ini perlu dibarengi upaya peningkatan aksesibilitas tersebut.

Untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat di desa, dilaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri

Pangan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa dengan prosentase KK miskin mengacu pada PPLS 2011 (lebih dari 26,33%) dengan karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dari tahun 2006 sampai 2016 sebanyak 371 desa. Tahun 2014 – 2016 pengembangan Desa Mandiri berturut-turut dilaksanakan pada 20, 22 dan 24 desa melalui dukungan APBD dan dukungan APBN dalam bentuk Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan pada 4 Kabupaten sebanyak 20 Desa.

## **B. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan**

Sebaran wilayah sentra produksi yang berbeda dengan sebaran wilayah pasar dan sentra konsumen mengharuskan distribusi bahan pangan agar tersedia bagi semua konsumen. Pembangunan aspek distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Pembangunan distribusi pangan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi lain untuk mendukung perbaikan distribusi pangan seperti perbaikan sarana jalan, transportasi dan pengaturan sistem pemasaran pangan yang lebih efisien dan berkeadilan.

### **1. Distribusi Pangan**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang distribusi pangan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemantauan harga dan distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan dan harga yang terjangkau khususnya menjelang HBKN, pemantauan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah, peningkatan akses pangan melalui kegiatan padat karya serta penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.

Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Desa (LDPM) mulai dikembangkan pada tahun 2009 melalui Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan, untuk memperkuat modal dan kemampuan Gapoktan sehingga mempunyai posisi tawar yang tinggi, mempunyai nilai tambah produk pertanian dan mempunyai akses terhadap pangan. Sasaran



dari pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM adalah Gapoktan di daerah sentra produksi padi dan atau jagung, memiliki unit usaha distribusi/ pemasaran/ pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan dan memiliki lahan sendiri untuk membangun sarana penyimpanan (gudang).

Kegiatan Penguatan-LDPM merupakan kegiatan yang berkelanjutan mulai dari Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca Kemandirian. Kegiatan Penguatan-LDPM yang dibiayai melalui APBN dengan mekanisme dana Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan langsung kepada rekening Gapoktan. Dana bantuan sosial Penguatan LDPM Tahun 2014 diberikan pada 8 Gapoktan Tahap Pengembangan (@75juta). Tahun 2015 diberikan kepada 23 Gapoktan Tahap Penumbuhan (@ Rp. 150 juta). Tahun 2016, 6 Gapoktan Tahap Penumbuhan dan 23 Gapoktan Tahap Pengembangan (@ Rp. 50 juta). Jumlah gapoktan yang sudah difasilitasi sampai dengan tahun 2016 sebanyak 172 gapoktan LDPM dengan perincian: (a). Pasca Mandiri 143 gapoktan; (b). Kemandirian 0 gapoktan; (c). Pengembangan 23 Gapoktan dan (d). Penumbuhan 6 Gapoktan.

Akumulasi pemanfaatan dana bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahun 2015 s/d 2016 pada 21 Kabupaten disajikan dalam Tabel 2.5.

**Tabel 2.5. Akumulasi Pemanfaatan Dana Bansos LDPM 2015-2016**

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan Gudang	Rp. 1.109.408.000,-
2	Pengembangan Cadangan Pangan	Rp. 586.182.500,-
3	Unit Distribusi dan Pemasaran	Rp. 3.804.409.500,-
Jumlah		Rp. 5.500.000.000,-

Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (2017)

Melalui APBD I Provinsi Jawa Tengah, Badan Ketahanan Pangan juga memfasilitasi gapoktan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dalam mengelola kegiatan distribusi agar memperoleh harga yang optimal pada saat panen raya, menghasilkan nilai tambah serta memupuk cadangan pangan melalui pemberdayaan Gapoktan yang diimpelentasikan melalui sistem tunda jual untuk menghadapi persoalan dinamika harga dan nilai tukar di pasar karena saat panen raya produksi cukup melimpah, sedangkan permintaan relatif stabil sepanjang tahun, sehingga harga turun pada tingkat yang tidak memberikan keuntungan bagi petani, sebaliknya pada musim paceklik kebutuhan pangan melebihi produksi yang tersedia sehingga harga meningkat. Fasilitasi yang diberikan berupa pemberian stimulan tunda jual berupa Gabah Kering Giling (GKG). Jumlah gapoktan yang tekah difasilitasi

melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 2012 s.d. 2016 sebanyak 218 Gapoktan.

## 2. Harga Pangan

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Apabila berkelanjutan, berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengupayakan agar harga komoditas pangan tetap stabil. Stabilitas merupakan gambaran dari fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga selama kurun waktu tertentu. Fluktuasi harga pangan diukur oleh besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil (Tabel 2.6.).

**Tabel 2.6. Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2013 -2016**

Komoditas	Koefisien Variasi				
	2014	2015	2016	Rata-rata	Target
Beras Termurah	2,71	3,84	1,51	2,678	5
Beras Medium	3,01	4,53	1,34	2,936	5
Beras Premium	2,37	3,34	1,53	2,432	5
Gula Pasir Lokal	3,53	7,99	9,89	8,943	5
Bawang Merah	11,72	24,70	9,76	17,229	25
Cabai Merah Keriting	69,22	34,31	34,55	34,427	25
Daging Ayam Ras	5,79	9,41	5,55	7,476	10
Telur Ayam Ras	6,97	7,25	6,88	7,067	10
Daging Sapi	2,18	4,03	3,17	3,601	10
Minyak Goreng	5,25	3,15	6,88	5,013	5
Tepung Terigu	1,79	1,34	1,22	1,277	5

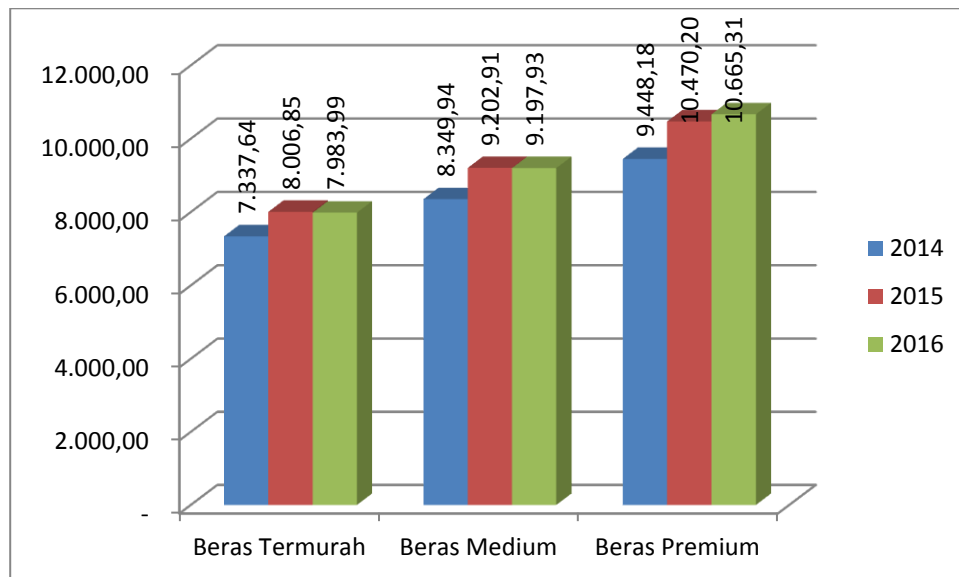
Sumber : Panel Harga Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng (2017)

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Jawa Tengah selama kurun waktu 3 tahun terakhir, secara umum stabil. Hal itu terlihat dari rata-rata nilai CV yang berada di bawah target. Seperti harga beras yang selama kurun 3 tahun terakhir menunjukkan harga yang stabil. Nilai CV harga beras hanya berkisar antara 2,64-3,43 dan masih di bawah target nilai CV sebesar 5. Demikian juga untuk komoditas yang lain yaitu jagung, kedelai, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras daging sapi, minyak goreng dan terigu semuanya dalam kondisi stabil. Hanya komoditas cabai merah keriting dan gula yang harganya kurang stabil.

### **Perkembangan Harga Beras Tahun 2014 - 2016**

Dalam upaya menjaga kestabilan harga beras Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras, kebijakan ini menjadi titik terang dalam upaya menjaga kestabilan harga beras. Selama kurun waktu 2014-2016 harga beras medium di Jawa Tengah selalu di atas HPP yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp. 7.300/kg.

**Gambar 2.8. Perkembangan Harga Beras 2014-2016 (Rp/Kg)**



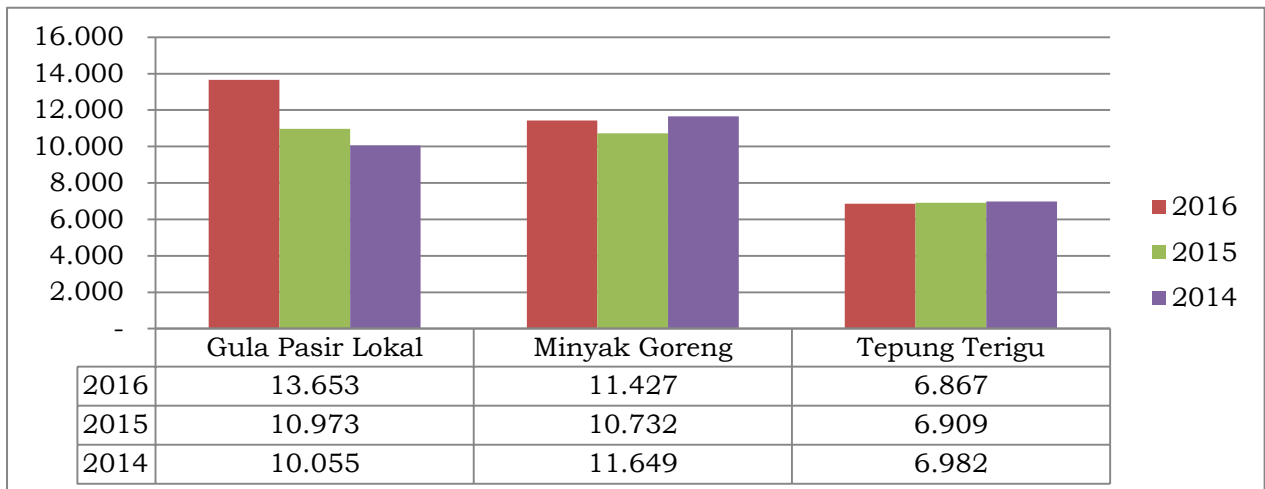
Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (2017)

Secara absolut, harga beras termurah dan medium tahun 2016 lebih rendah dibanding tahun 2015, dikarenakan pada tahun 2016 terjadi kemarau basah dan curah hujan pada cukup tinggi pada saat musim panen. Dengan kondisi ini berdampak pada kualitas beras yang dihasilkan kurang baik dibanding tahun sebelumnya. Disamping itu kuatnya cadangan pangan pemerintah dan berbagai kegiatan dalam upaya memperpendek rantai pasok beras dari produsen sampai konsumen antara lain Penguatan Lembaga Distribusi Pangan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia secara psikologis ikut berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga beras di Jawa Tengah.

### **Perkembangan Harga Gula Pasir, Minyak Goreng, dan Tepung Terigu**

Harga gula pasir tahun 2014 – 2016 cenderung kurang stabil karena adanya kelangkaan pasokan gula di pasar. Adapun harga minyak goreng dan terigu stabil.

**Gambar 2.9. Perkembangan Harga Gula Pasir, Minyak Goreng & Terigu Tahun 2014-2016 (Rp/Kg)**

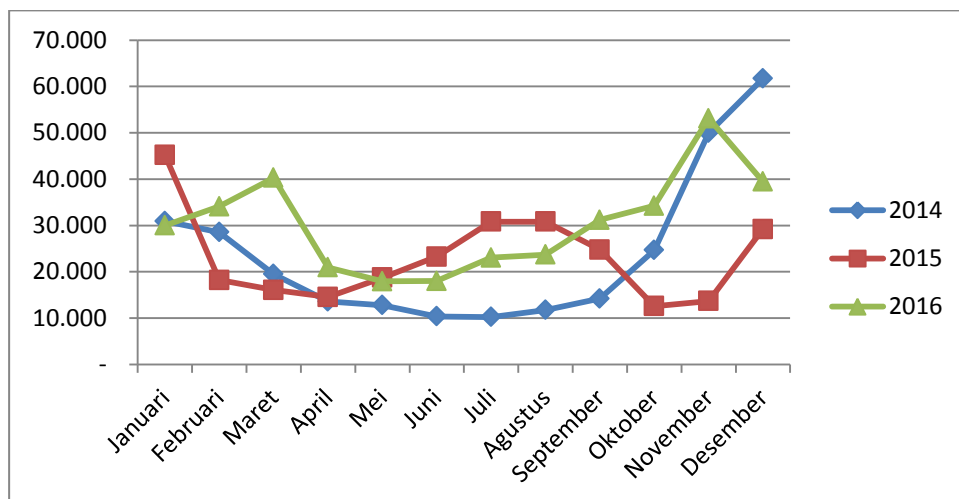


Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (2017)

Harga komoditas gula pasir selama kurun waktu 2014-2016 cenderung mengalami peningkatan, peningkatan yang cukup signifikan terjadi tahun 2016 kondisi ini disebabkan karena meningkatnya HPP (Harga Patokan Petani) gula yang meningkat sejak bulan Mei 2016 dari Rp 8.500,-/Kg menjadi Rp. 8.900,-/Kg disamping itu meningkatnya permintaan gula pasir lokal oleh industri makanan minuman ikut memicu meningkatnya harga gula pasir lokal. Sedangkan harga minyak goreng dan terigu selama kurun waktu tahun 2014-2016 stabil.

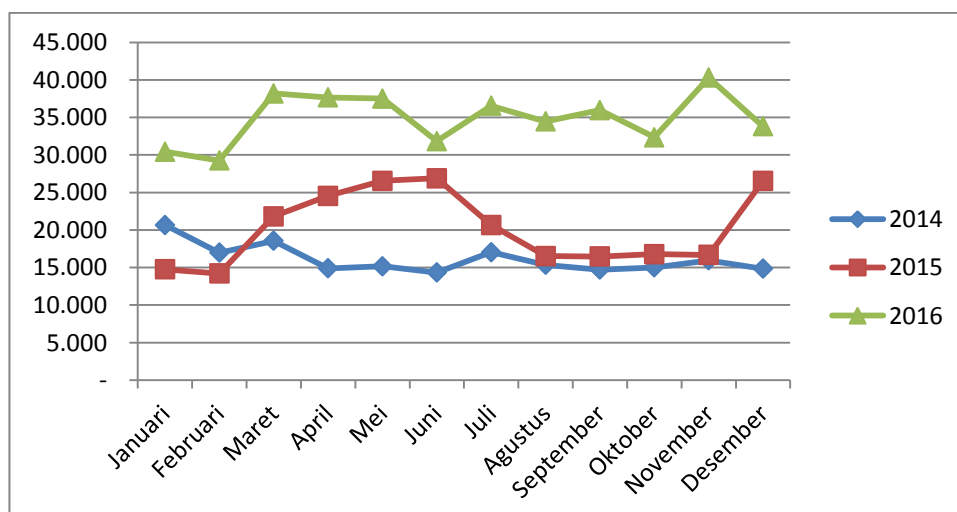
### ***Perkembangan Harga Cabe Merah dan Bawang Merah***

Harga cabe merah dan bawang merah cenderung fluktuatif mengikuti musim panen dan perubahan permintaan maupun penawaran. Harga rata-rata komoditas cabai merah keriting tahun 2014-2016 terus mengalami kenaikan, kenaikan ini lebih banyak disebabkan karena meningkatnya biaya usaha tani dari komponen biaya upah tenaga kerja dan sarana produksi. Harga cabai merah keriting tahun 2014-2016 kurang stabil, kondisi ini disebabkan karena komoditas cabai tidak bisa disimpan lama sehingga sangat rentan terhadap perubahan supply-demand, meningkatnya permintaan pada saat Hari Besar Keagamaan dan cabai dari Jawa Tengah banyak didistribusikan keluar daerah (DKI, Sumatra dll).

**Gambar 2.10. Perkembangan Harga Cabe Tahun 2014-2016 (Rp/Kg)**

Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (2017)

Harga rata-rata komoditas bawang merah tahun 2014-2016 terus mengalami kenaikan, kenaikan ini lebih banyak disebabkan karena meningkatnya biaya usaha tani dari komponen biaya upah tenaga kerja dan sarana produksi. Namun demikian harga cabai merah keriting setiap tahun selama tahun 2014-2016 cukup stabil, dan harga bawang merah tahun 2016 lebih stabil dibanding tahun 2015 dan 2014. Namun demikian harga bawang merah masih rentan terhadap terjadinya fluktuasi harga karena sebaran produksi pada daerah sentra yang terbatas, meningkatnya permintaan pada saat Hari Besar Keagamaan dan bawang merah dari Jawa Tengah banyak didistribusikan keluar daerah.

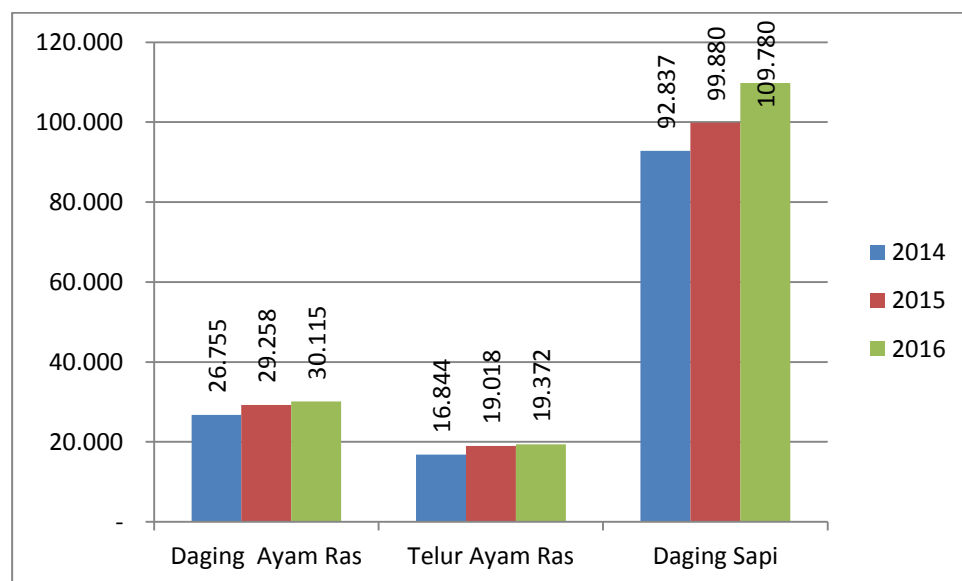
**Gambar 2.11. Perkembangan Harga Bawang Merah Tahun 2014-2016 (Rp/Kg)**

Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (2017)

### ***Perkembangan Harga Daging Sapi, Daging Ayam Dan Telur***

Harga rata-rata komoditas daging sapi, daging ayam dan telur tahun 2014-2016 terus mengalami kenaikan, kenaikan ini lebih banyak disebabkan karena meningkatnya biaya usaha tani dari komponen sarana produksi. Namun demikian harga komoditas daging sapi, daging ayam dan telur setiap tahun cukup stabil.

**Gambar 2.12. Perkembangan Harga Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras Tahun 2014-2016**



Sumber : Bidang Distribusi Pangan (2017)

### **3. Cadangan Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk kelanjutan hidupnya. Oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Ketersediaan pangan tersebut dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasukan pangan; dan (3) cadangan pangan.

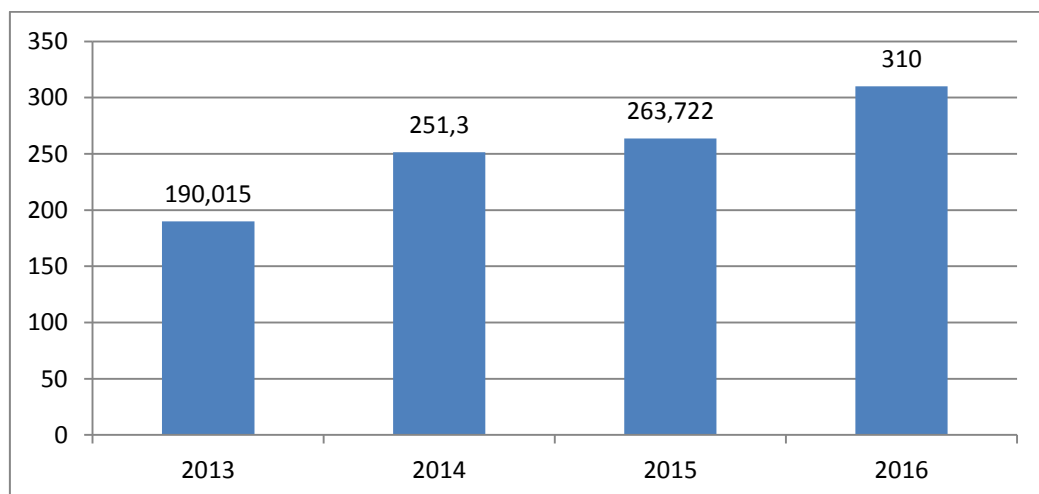
Bila terjadi kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan di suatu wilayah dapat diatasi dengan melepas cadangan pangan, oleh sebab itu cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan. Beberapa alasan yang mendasari Pengembangan Cadangan Pangan adalah :

- (a) Bank Dunia pada tahun 2008 memperingatkan bahwa cadangan pangan Indonesia berada dalam titik terendah sehingga bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi sejak awal mengingat cadangan pangan dunia turun hampir setengahnya;
- (b) Situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan; (c) masa panen tidak merata antar waktu dan daerah mengharuskan adanya cadangan pangan; dan
- (d) Banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah. Untuk itulah diperlukan adanya cadangan pangan yang di kelola oleh Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Desa), maupun Cadangan Pangan yang dikelola oleh masyarakat.

### **Cadangan Pangan Pemerintah**

Keberadaan cadangan pangan sangat penting sesuai UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Permendagri No 30 Tahun 2008. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Balai Pengembangan Cadangan Pangan 2009 – 2013 mengalami peningkatan (Tabel 2.4.).

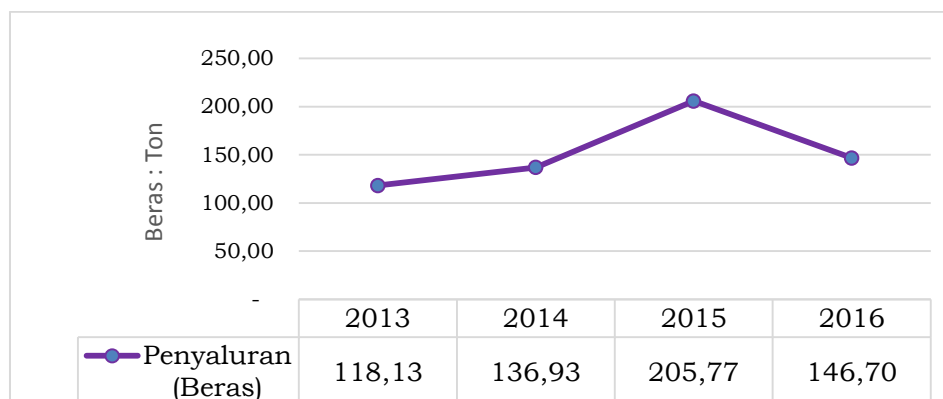
**Gambar 2.13. Perkembangan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi di BPCP Tahun 2014 – 2016 (Ton GKG)**



Sumber : Balai Cadangan Pangan (2017)

Cadangan pangan yang ada di BPCP telah disalurkan ke daerah rawan pangan transien di beberapa wilayah kabupaten/kota yang terkena bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kekeringan.

**Gambar 2.14. Perkembangan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi di BPCP Tahun 2014 – 2016 (Ton Beras)**



Sumber : Balai Cadangan Pangan (2017)

### ***Cadangan Pangan Masyarakat***

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan diamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Upaya pembangunan ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan yaitu dengan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk peningkatan cadangan pangan di masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat di daerah yang berpotensi rawan pangan. Sampai dengan tahun 2016 telah direvitalisasi sebanyak 495 Lumbung Pangan (APBD 214 lumbung, APBN 281 lumbung) di 30 kabupaten/kota.

### **C. Konsumsi Pangan**

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal, guna meningkatkan kualitas



SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi penganeekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta penganeekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Program Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan pada tahun 2014 – 2016 dilaksanakan pada 357 desa/kelompok. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan:

- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;
- Pengembangan Kebun Bibit Desa sebagai sumber penyediaan bibit ditingkat desa;
- Pengembangan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal sebagai upaya meningkatkan citra pangan lokal yang sudah dianggap inferior menjadi sejajar dengan kelompok pangan yang lain dan penyusunan menu B2SA;
- Pengembangan kebun sekolah sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran anak sejak usia dini agar kenal dan cinta pada dunia pertanian;
- Pengembangan penyusunan menu B2SA berbasis sumberdaya lokal

Keberhasilan yang sudah dicapai antara lain :

- Tumbuhnya kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dan anak sejak usia dini dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras melalui Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
- Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;
- Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal;

- Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penghitungan skor PPH;

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dari tahun 2014-2016 sudah hampir mendekati angka standar dan secara agregat skor PPH sudah mencapai 91,8 di tahun 2016. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Jawa Tengah dari aspek konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7. Skor PPH di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2016**

No.	Kelompok Pangan	Standar	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Padi-padian	25,00	25,00	25,00	25,00	24,90
2	Umbi-umbian	2,50	2,19	2,21	2,09	1,90
3	Pangan Hewani	24,00	17,62	17,96	17,96	19,20
4	Minyak & lemak	5,00	3,91	5,00	5,00	5,00
5	Buah/biji berminyak	1,00	0,79	1,00	1,00	0,90
6	Kacang-kacangan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Gula	2,50	1,78	1,79	1,80	2,00
8	Sayur & buah	30,00	29,06	28,82	28,87	28,00
9	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		100,00	90,35	91,78	91,45	91,80
Skor PPH Nasional			88,30	81,80	85,20	85,20

Sumber: Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan (2017)

Mengacu pada angka konsumsi energi ideal yang diperlukan bagi setiap individu untuk dapat hidup sehat, berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2009, maka konsumsi beras, minyak dan lemak di Jawa Tengah perlu diturunkan. Namun demikian, konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah masih perlu ditingkatkan. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2016**

No	Indikator	Ideal	2013	2014	2015	2016
1	Beras (Kg/Kap/Th)	91,00	89,49	88,54	98,96	99,11
2	Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	35,60	24,24	24,80	21,85	15,13
3	Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	54,80	36,19	38,53	40,04	44,37
4	Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	91,30	67,70	67,10	67,22	67,82

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2017

Meningkatnya konsumsi beras disebabkan oleh tingginya tingkat ketersediaan, kemudahan akses masyarakat terhadap komoditas tersebut yang didukung dengan harga beras yang stabil dan terjangkau. Adapun penurunan konsumsi umbi-umbian karena ketersediaan pangan olahan berbasis umbi-umbian masih terbatas. Selain itu harga produk setengah jadi dalam bentuk umbi-umbian masih lebih mahal dibandingkan harga beras dan harga tepung terigu.

Konsumsi energi tahun 2013-2015 mengarah pada konsumsi ideal sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Tahun 2016 berdasarkan rekomendasi Widyakarya Pangan Nasional dan Gizi Tahun 2012 digunakan standar konsumsi ideal 2.150 kkal/kap/hari (Tabel 2.9).

**Tabel 2.9.**  
**Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2013 – 2016**

No.	Kelompok Pangan	Tahun (Standar Ideal – 2000- WNPG 2009)				Tahun (Standar Ideal – 2150- WNPG 2012)	
		Ideal	2013	2014	2015	Ideal	2016
1	Padi-padian	1.000	1.003,1	1.001,12	1.007,14	1.750	1.068,58
2	Umbi-umbian	120	87,70	88,28	81,73	129	81,84
3	Pangan Hewani	240	176,21	179,59	176,86	258	206,63
4	Minyak & lemak	200	156,48	256,65	256,65	215	283,84
5	Buah/biji berminyak	60	31,55	54,85	43,9	64	40,12
6	Kacang-kacangan	100	261,15	223,45	214,76	108	195,47
7	Gula	100	71,20	71,61	72,08	108	84,74
8	Sayur & buah	120	116,25	115,29	115,48	129	120,23
9	Lain-lain	60	101,50	13,66	35,14	64	20,29
JUMLAH		2000	2.005,14	2.004,50	2.003,74	2.150	2.101,75

Sumber : Hasil survey PPH Kab/Kota Tahun 2013-2016 diolah Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan (2017)

Berdasarkan data pada Tabel 2.9. dapat dilihat bahwa konsumsi padi-padian sebagai sumber karbohidrat semakin menurun menuju angka konsumsi ideal. Untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan antara lain :

1. Kegiatan pengembangan pangan alternatif merupakan salah satu upaya percepatan penganekaragaman pangan dalam rangka pengenalan dan menumbuhkembangkan potensi pangan lokal pembinaan dan pelatihan kepada kelompok kelompok pengolah pangan lokal di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

2. Sosialisasi diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya Lomba Cipta Menu dan mengikuti beberapa event pameran baik dalam provinsi maupun luar provinsi yang menampilkan variasi olahan berbahan dasar pangan lokal.
3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Swasta akan turut mendukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, saling bertukar informasi dan inovasi tentang pengembangan pangan lokal di Jawa Tengah pada khususnya.
4. Model Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal (MP3L)  
Bertujuan untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu lebih kearah pangan pokok bukan kudapan. Berada di kabupaten Temanggung, Wonogiri, Kebumen, Grobogan dan Pati. Jenis produk yang akan dihasilkan adalah beras sehat (beras dari singkong ditambah kacang-kacangan untuk penambah protein), mie sehat dan macaroni semua dari singkong dan jagung.

Jumlah kelompok pengembangan pangan lokal yang sudah dibina oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016 sejumlah 144 kelompok. Pembinaan berupa fasilitasi stimulan alat pengolah pangan sesuai kebutuhan kelompok. Jenis olahan pangan antara lain aneka tepung-tepungan lokal, aneka kue kering dan kue basah berbahan sukun, waluh, singkong, ubi jalar, jagung. Pengembangan makanan tradisional/pangan khas Jawa Tengah juga dilaksanakan melalui kegiatan lomba cipta menu di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi, Demonstrasi masakan 3B Plus (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman). Pengembangan makanan tradisional didukung dengan ketersediaan bahan pangan nabati dan hewani yang dapat diolah menjadi aneka pangan olahan.

#### **D. Keamanan Pangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 memberikan amanat pada Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu (ayat 1) dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan (ayat 5). Selain itu, pada Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keamanan Pangan merupakan salah satu sub urusan pangan yang mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan

pangan segar dan distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Memperhatikan amanat tersebut, Badan Ketahanan Pangan selaku institusi yang menyelenggarakan urusan pangan menginisiasi regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan segar yaitu Pergub Nomor 97 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dan Pergub Jateng Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Ditetapkannya pergub No 40/2016 diharapkan dapat semakin mendorong produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diedarkan di pasar aman untuk dikonsumsi, sesuai parameter cemaran mikroba, kandungan residu pestisida dan logam berat (dibawah BMR).

Pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*pre market*)

Pengawasan ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir (Saat produksi, panen, grading, packing). Bentuk pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan mencakup : (i). Mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2, GAP, GHP (*registrasi packing house*/pendaftaran rumah kemas) dan (ii) Mekanisme Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan

b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (Post Market)

Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan diperedaran mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (*Good Ritel Practices*) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba patogen dan logam berat)

***Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sebelum Diedarkan ( Pre Market)***

Pengawasan dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Jawa Tengah adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 tahun 2009 dan sebagai Ketua OKKP-D adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. OKKP-D tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P). OKKP-D Jawa Tengah

sampai dengan 2016 telah menerbitkan 1 sertifikat Prima 2, 63 sertifikat Prima 3 dan 175 sertifikat PSAT.

Sertifikasi Prima 3 dan Pendaftaran PSAT merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut sesuai dengan permintaan pasar baik pasar Luar Negeri maupun pasar dalam negeri. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga dibanding pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga ada dampak peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah disertifikasi. Karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar).

### ***Pengawasan Keamanan Pangan di Peredaran (Post Market)***

Pengawasan keamanan pangan dilakukan oleh Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) dengan SK Gubernur Nomor 525/9/2010, tanggal 10 Maret 2010. Susunan Tim SKPT sebagai berikut :

1. Ketua : Badan Ketahanan Pangan Prov Jateng;
2. Wakil Ketua : Balai Besar POM Semarang;
3. Sekretaris : BKP dan BBPOM;
4. Anggota : Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Bina Produksi dan Biro Bina Sosial SETDA Jateng.

Pembentukan Tim SKPT tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan pengawasan pangan serta menekan kasus-kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk meningkatkan pengawasan keamanan pangan di tingkat kab/kota, Gubernur juga telah membuat surat edaran kepada Bupati/Walikota agar supaya kabupaten/kota juga membentuk Tim SKPT. Sampai saat ini baru ada 11 kabupaten/kota yang sudah membentuk Tim SKPT yaitu Banyumas, Tegal, Kendal, Boyolali, Pemalang, Kebumen, Wonosobo, Demak, Kota Pekalongan, Kota Surakarta dan Kota Semarang. Hasil pengawasan keamanan pangan segar yang dilakukan selama Tahun 2013 - 2016 tersaji pada Tabel 2.10.

**Tabel 2.10. Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2013-2016**

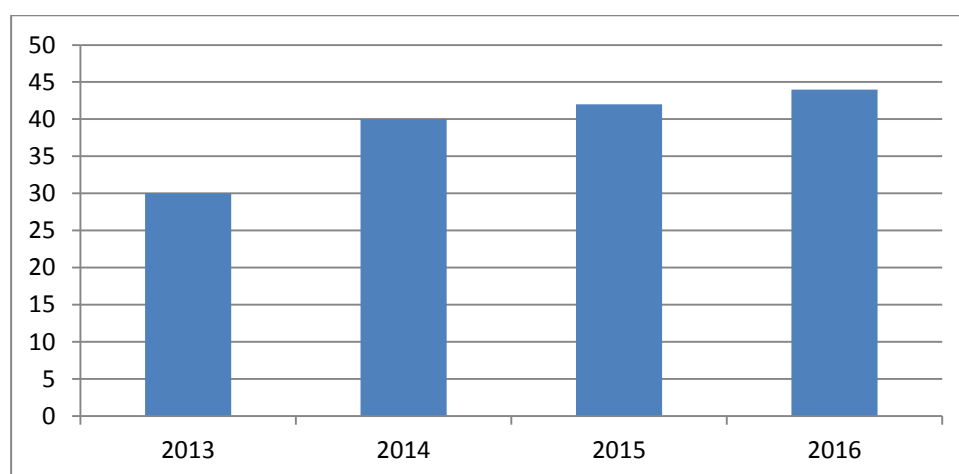
Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman
Prima 2	-	-	-	-	1	1	-	-
Prima 3	7	7	10	10	6	6	8	8
PSAT	13	12	54	54	59	59	39	39
Pengawasan Pangan Segar	41	30	33	26	66	56	70	66
Total	61	49	97	84	132	122	117	113

*Sumber: Bidang Keamanan Pangan (2017)*

### ***Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan***

Dalam rangka pembinaan dan fasilitasi mutu dan keamanan pangan, salah satu kegiatan prioritas BKP adalah pembinaan dan pengelolaan warung sekolah. Pembinaan dan pengelolaan warung sekolah bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang aman dan bermutu bagi anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa, meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola warung sekolah dalam memproduksi pangan yang aman dan bermutu bagi anak sekolah. Sampai dengan tahun 2013 - 2016 pembinaan warung sekolah dilaksanakan pada 156 kantin sekolah. Selain pembinaan, BKP juga memfasilitasi stimulan peralatan warung sekolah berupa sarana peralatan penunjang sanitasi dan higienitas dalam keamanan pangan warung sekolah.

**Gambar 2.15. Perkembangan Jumlah Kantin Sekolah Binaan Badan Ketahanan Pangan**



Setelah melakukan pembinaan dan memberikan bantuan terhadap kantin sekolah, diharapkan kantin sekolah tersebut termotivasi untuk selalu menyediakan pangan jajanan anak sekolah yang aman. Sebagai bentuk motivasi tersebut dari BKP telah mengupayakan untuk menyeleksi warung-warung sekolah yang sudah dikelola secara baik dan benar sesuai kaidah keamanan pangan untuk memperoleh Piagam Pra Bintang Keamanan Pangan, dan selanjutnya bagi warung sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan Pra Bintang akan diikuti dalam seleksi Piagam Bintang Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh BBPOM.

### **E. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang ketahanan pangan sesuai kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel 2.11.

**Tabel 2.11.**  
**Target Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018**

<b>No</b>	<b>Indikator SPM</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Penguatan Cadangan Pangan	60%	75%	80%	90%	95%	100%
2	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah	95%	97%	100%	100%	100%	100%
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
4	Penanganan daerah rawan pangan	50%	55%	60%	60%	60%	60%

*Sumber: Pergub Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2014*

Hasil evaluasi penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016 menunjukkan bahwa target penerapan keempat indikator tersebut dapat dilaksanakan. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memenuhi pelayanan dasar ditunjukkan oleh hasil sebagaimana Tabel 2.12 sebagai berikut :

#### a. Penguatan Cadangan Pangan

Pemerintah provinsi telah memiliki lembaga cadangan pangan dan menyediakan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Badan Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP) pada tahun 2016 sebanyak



207,41 ton setara beras (103,70%). Cadangan pangan ini digunakan untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan transien di beberapa wilayah kabupaten/kota yang mengalami bencana alam/puso.

- b. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah  
Target komoditas yang wajib dipantau adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah. Persentase capaian ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan tahun 2016 sebesar 100% sesuai target SPM. Dengan capaian tersebut artinya bahwa kemudahan masyarakat untuk mendapat informasi tentang harga dan pasokan komoditas utama semakin terjamin. Selain itu membantu pemerintah dan masyarakat dalam memantau kecukupan pasokan pangan di daerah.
- c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan  
Pengawasan keamanan pangan segar diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Tahun 2016, jumlah sampel yang telah diuji mencapai 117 sampel, dengan hasil 96,58% berstatus aman (lebih tinggi dengan target SPM sebesar 80%). Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)*, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Handling Practices (GHP)*, pengolahan pangan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Pembinaan juga dilakukan pada rantai distribusi dan pada pengecer. Fungsi pembinaan ini dilakukan oleh tim SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu) dan Tim OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) Jawa Tengah.
- d. Penanganan Daerah Rawan Pangan  
Penanganan daerah rawan pangan selain untuk mengatasi kerawanan pangan akibat bencana alam dan gagal panen, juga diarahkan untuk rumah tangga miskin. Upaya yang dilakukan adalah dengan program Desa Mandiri Pangan dan fasilitasi lumbung pangan masyarakat di daerah yang mengalami defisit pangan pada saat masa tanam atau berpotensi rawan pangan/miskin. Untuk meningkatkan kemampuanantisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta

intervensi melalui Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Persentase penanganan daerah rawan pangan tahun 2016 sebesar 62,86% melebihi target 60% dan meningkat dari capaian tahun 2015 sebesar 61,29%.

**Tabel 2.12.**  
**Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2016**

No	Jenis Pelayanan	SPM						
		Satuan	Target			Realisasi		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Penguatan Cadangan Pangan	Ton setara beras (%)	150 (75)	160 (80)	180 (90)	200,48 (100,24)	261,14 (130,57)	207,41 (103,70)
2	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	97	100	100	97,22	100	100
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	80	80	80	86,6	92,42	96,58
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	55	60	60	56,25	61,29	62,86

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2017

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

### A. Tantangan

#### 1) Perubahan Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

#### 2) Penanganan Kerawanan Pangan

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami

musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

### 3) Perekonomian Global dan Pasar Bebas

Situasi perekonomian global salah satunya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pangan sehingga berdampak terhadap ketahanan pangan global yang dapat berimbas kepada ketahanan pangan daerah. Krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir menyebabkan kelangkaan pangan di pasar global yang mempengaruhi peningkatan harga pangan di dalam negeri. Untuk mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, Provinsi Jawa Tengah harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Berdasarkan situasi tersebut, kebijakan meningkatkan produksi pangan dalam negeri menjadi mutlak dilakukan.

Selain perekonomian global, ketahanan pangan Jawa Tengah juga dihadapkan pada tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas. Pemberlakuan pasar bebas memberikan peluang bagi produk pangan Jawa Tengah untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Sebaliknya, penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Peningkatan daya saing produk pangan domestik dan penguatan kapasitas sumberdaya pangan sangat diperlukan menghadapi pasar bebas .

### 4) Permasalahan Gizi (*Malnutrition*)

Peningkatan pendapatan terutama pada masyarakat perkotaan (urban) telah mengubah pada gaya hidup terutama pola makan. Telah terjadi perubahan konsumsi dari tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat dan rendah lemak menjadi karbohidrat

sederhana, rendah serat dan tinggi lemak. Perubahan tersebut terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Selain diet yang tidak seimbang, aktivitas fisik rendah juga menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan overweight dan obesitas.

5) Stabilsasi Pasokan dan Harga Pangan

UU 23/2014 mengamanatkan pada Pemerintah Provinsi dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar Jawa Tengah akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

6) Kebutuhan Pangan untuk Kesehatan

Masyarakat modern yang peduli kesehatan menuntut makanannya setelah berfungsi sebagai pemasok zat-zat gizi dan cita rasa pemuas mulut, harus berfungsi menjaga kesehatan dan kebugaran. Kualitas sensoris, gizi, serta keamanan pangan tak luput dari pemenuhan selera gizi masyarakat. Tantangan industri pangan tidak jauh dari pemenuhan kemampuan gizi konsumen. Hal ini karena untuk memperoleh produk pangan yang bermutu baik dan terjamin bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerangan pengendalian dan pengawasan dalam sistem jaminan mutu.

## **B. Peluang**

- 1) Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Jawa Tengah
- 2) Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan

sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.

- 3) Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
- 4) Jawa Tengah memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
- 5) Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.